

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfitra. 2014. *Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses,
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UMPAM PRESS.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan et al. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Febri Handayani dan Lysa Angrayni. 2023. *Due Process of Law (Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana)*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri Group.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Humaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.



Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

- Jonaedi Efendi *et al.* 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, T. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum*.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Effendi. 2010. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Muhammad Rusli. 1955. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Hari Sasangka. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Totalmedia.
- Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan. 2019. *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Yahya Harahap. 2022. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal



Maruli Silalhi dan I. Tajudin. 2018. *Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka setelah Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

- Agus Raharjo dan Angkasa. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*. Mimbar Hukum. Volume 23 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Erick Malombeke *et al.* 2021. *Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana*. Lex Administratum Volume 9 Nomor 4.
- Fachrul Rozi. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi.
- Imman Yusuf Sitingjak. 2018. *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Maksitek. Volume 3 Nomor 3.
- Marfuatul Latifah. 2021. *Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?*. Negara Hukum. Volume 12 Nomor 1.
- Novsias Rompis *et al.* 2020. *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*. Lex Crimen. Volume 4 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Reza Adilla dan Ledy Diana. 2015. *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya Error in Persona (Studi Kasus Reza Fahlefi)*. Jurnal Online Mahasiswa. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan. 2024. *Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka*. IBLAM law Review. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- Ronaldo Ipakit. 2015. *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Lex Crimen. Volume IV Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Salut Murniasih. 2019. *Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan terhadap Anak*. Verstek. Volume 7 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Tina Oktafiani dan Mukhlis. 2018. *Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan dan Implikasinya terhadap Kekuatan Alat Bukti*. JIM Bidang Hukum Pidana. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.



Wilhelminus Taliak. 2015. *Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana*. Lex Crimen. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Yogi Prasetyo. 2017. *Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo.

Skripsi

Dina Christiana. 2011. *Upaya Penemuan dan Pencarian Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhamad Jufri Tabah. 2021. *Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Persidangan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Hermanto. 2019. *Kekuatan Hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.



Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian negara Republik Indonesia.

Website/Internet

- Lulu Hanifah. 2015. “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”. WEB Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 28 April 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10796>.
- Anonim. 2020. “Laporan Penyiksaan 2020 dalam Memperingati Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2020”. Kontras, Diakses 28 Januari 2024. <https://kontras.org/2020/06/24/laporan-penyiksaan-2020-dalam-memperingati-hari-dukungan-bagi-korban-penyiksaan-sedunia-2020/>.
- Fatihah Maulidiyanti. 2021. “Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2020-Mei 2021”. Kontras. Diakses 28 Januari 2024. <https://kontras.org/2021/06/25/laporan-situasi-praktik-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia-di-indonesia-periode-juni-2020-mei-2021/>.
- Ichsan Zikry. 2014. “Mengenal Exclusionary Rules”, LBH Jakarta. Diakses 27 Juli 2022. <https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/>
- Giovani. 2021. “Menilik Penerapan Prinsip Exclusionary Rules dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”. PN Kota Mobagu. Diakses Pada tanggal 27 Juli 2024, https://www.pnkotamobagu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83:menilik-penerapan-prinsip-exclusionary-rules-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia&catid=86&Itemid=650

